

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG  
TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG  
(Studi di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**(Tesis)**

**NI KADEK PONIASIH  
1926021005**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (Studi di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

**NI KADEK PONIASIH**

Kampung Sangga Buana adalah kampung yang pertama kali mendapatkan bantuan usaha kampung (BUMKam). Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan BUMKam dan efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan BUMKam Buana Jaya, dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik. 2) Efektivitas pengawasan BPK efektif dilihat empat hal, yaitu: *pertama*, penetapan standarnya sudah sesuai dengan tujuan pengawasan yaitu mengetahui jalannya perencanaan setiap unit usaha BUMKam, mengetahui budget yang digunakan sudah sesuai dengan SOP, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan planing yang telah ditentukan. *Kedua*, Penetapan pengukuran standar yang dilakukan oleh pengawas melalui standar waktu yaitu Badan Permusyawaratan Kampung melakukan pengawasan setiap bulan atau sesuai dengan kebutuhan sudah sesuai dengan tujuan mengetahui jalannya pekerjaan dan mengetahui pelaksanaan kerjanya sesuai dengan pelaksanaannya. *Ketiga*, Kesesuaian hasil yang dilakukan BPK yaitu memberikan saran untuk mengalih fungsikan anggaran unit usaha penggemukan sapi ke unit usaha simpan pinjam dan sudah sesuai dengan tujuan pengawasan yaitu memperbaiki kesalahan yang ada dan melakukan pencegahan agar tidak terulang kembali. *Keempat*, Tindakan koreksi tidak ada penyimpangan yang terjadi karena BPK mengalih fungsikan anggaran unit usaha penggemukan sapi ke unit usaha simpan pinjam sehingga sesuai dengan tujuan pengawasan yaitu jalannya perencanaan sesuai dengan standar operasional prosedur. Pengelolaan BUMKam yang dilakukan dengan baik dan Efektivitas Pengawasan BPK terhadap BUMKam yang sudah efektif tidak mencerminkan bahwa pengawasan BPK terhadap BUMKam dapat meningkatkan pekeconomian kampung, meningkatkan PADes karena pengawasan BPK terhadap BUMKam kampung sangga buana sudah efektif. Tetapi pengelolaan untuk meningkatkan perekonomian kampung dan meningkatkan PADes untuk kampung sangga buana tidak efektif dilihat dari tidak adanya pengelolaan jangka panjang.

**Kata Kunci: BUMKam, Efektivitas Pengawasan, BPK**

## **ABSTRAK**

**SUPERVISION EFFECTIVENESS  
VILLAGE CONSULTATION AGENCY  
ON THE MANAGEMENT OF THE VILLAGE-OWNED BUSINESS  
ENTITY  
(Study in Sangga Buana Village, Way Seputih District  
Central Lampung Regency)**

**BY**

**NI KADEK PONIASIH**

Sangga Buana Village was the first village to receive village business assistance (BUMKam). The purpose of the study was to determine the management of BUMKam and the effectiveness of the supervision of the Village Consultative Body (BPK) in Sangga Buana Village, Way Seputih District, Central Lampung Regency. This study uses a qualitative method. Collecting data using interviews, documentation, and observation. The results of the study show that: 1) The management of Buana Jaya BUMKam seen from the planning, implementation, and accountability aspects has been going well. 2) The effectiveness of effective BPK supervision can be seen from four things, namely: first, the standard setting is in accordance with the supervision objectives, namely knowing the planning of each BUMKam business unit, knowing the budget used is in accordance with SOPs, knowing the implementation of work in accordance with the predetermined plan. Second, the determination of standard measurements carried out by supervisors through time standards, namely the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Kampung) conducts supervision every month or according to needs, in accordance with the objectives of knowing the course of work and knowing the implementation of its work in accordance with its implementation. Third, the suitability of the results carried out by BPK, namely providing suggestions for transferring the function of the cattle fattening business unit budget to the savings and loan business unit and is in accordance with the supervisory objectives, namely correcting existing mistakes and taking precautions so that they do not happen again. Fourth, corrective action no deviations occurred because BPK transferred the budget of the cattle fattening business unit to the savings and loan business unit so that it was in accordance with the purpose of supervision, namely the planning process was in accordance with the SOP. A well-managed BUMKam and the effectiveness of BPK's supervision of BUMKam that have been effective do not reflect that BPK's supervision of BUMKam can improve the village economy, increasing PADes because BPK's supervision of Sangga Buana village BUMKam has been effective. However, the management to improve the village economy and increase the PADes for the Sangga Buana village is not effective in terms of the absence of long-term management.

**Keywords: BUMKam, Supervision Effectiveness, BPK**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG  
TERHADAP PENGELOLAAN BUMKam  
(Studi di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**Oleh**

**Ni Kadek Poniasih**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG  
TERHADAP PENGELOLAAN BUMKam  
(Studi di Kampung Sangga Buana Kecamatan  
Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : **NI KADEK PONIASIH**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1926021005

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Feni Rosalia, M.Si.**  
NIP.196902191994032001

**Dr. Maulana Mukhlis, M.I.P.**  
NIP.197804302008121001

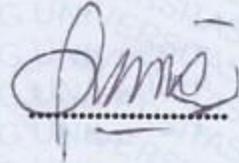
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP. 196010101986031006

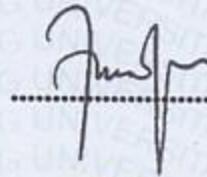
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

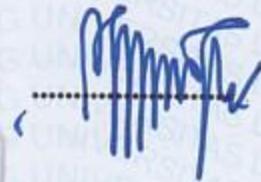
Ketua : **Dr. Feni Rosalia, M.Si**



Penguji Utama : **Dr. Tabah Maryanah**



Anggota : **Dr. Maulana Mukhlis, M.I.P**

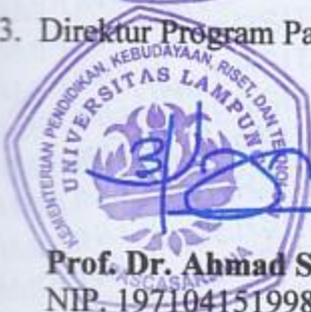


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**  
NIP. 196108071987032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**  
NIP. 197104151998031005



Tanggal Lulus Ujian Tesis : **08 Desember 2021**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “ **EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (Studi di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)** ” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2021  
Yang membuat pernyataan,



Ni Kadek Poniasih  
NPM 1926021005

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ni Kadek Poniasih dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 09 Maret 1997. Penulis merupakan putri kedua dari lima bersaudara, pasangan dari Bapak Jro Mangku Pande Pastika dan Ibu Jro Mangku Pande Pastika. Penulis menempuh pendidikan di SDN 01 Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2009, SMPN 01 Rumbia Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2012, SMAN 01 Rumbia Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015, S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung Tahun 2019 dan Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung, Penulis pernah mengikuti organisasi internal kampus yaitu HMJ Ilmu Pemerintahan Tahun 2015-2019, Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Unila Universitas Lampung (UKMH) Tahun 2015-2019, Bem U di bidang Aksi Propaganda (AKSPRO) Tahun 2015-2018 dan penulis juga mengikuti organisasi eksternal yaitu Pengurus DPK Peradah Lampung Tengah pada tahun 2021-2025.

## *MOTTO*

“Tubuh dibersihkan dengan air  
Pikiran dibersihkan dengan kejujuran  
Roh dengan ilmu dan tapa  
Akal dibersihkan dengan kebijaksanaan”  
( Manawa Dharmasastra, bab V sloka 109 )

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil  
tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”  
( Eistein )

“ Jangan pernah berambisi untuk mengejar sesuatu yang pada kenyataannya tak  
bisa dibawa mati dan jangan pernah membandingkan proses jalan hidupmu  
dengan orang lain”  
(NI KADEK PONIASIH)



## *Persembahan*

Om swastiastu

Teriring doa dan rasa syukur saya kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta  
leluhur yang senantiasa membimbing dan melindungi

Kupersembahkan tesis ini kepada

Ibu dan Bapakku tercinta, terimakasih atas doa, kasih sayang serta  
pengorbanan selama ini, yang telah mendidik dengan penuh kasih  
sayang, kesabaran dan selalu memberikan semangat sehingga dapat  
menyelesaikan tesis ini.

Kakakku tersayang Niluh Pande Rahayu (ALM)  
Adikku tersayang, Nyoman Sumerta, Ketut Julianti, Dan Wayan Anis  
Kusumadewi kalian adalah penyemangatku hingga akhirnya aku bisa  
menyelesaikan Tesis ini

Almamaterku  
Universitas Lampung



## SANWACANA

Suksma Penulis haturkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan leluhur yang selalu memberikan kerahayuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung Terhadap Pengelolaan Bumkam (Studi di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya tesis ini, Penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr.Maulana Mukhlis, M.Ip selaku Wakil Direktur Bidang Umum Program Pascasarjana Universitas Lampung sekaligus Pembimbing pendamping, terimakasih atas kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan, masukan dan saran, arahan, nasehat serta motivasi kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan tesis secara baik dan maksimal.
4. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku dosen Pembahas dan Penguji terimakasih atas masukan, pengarahan, saran dan kritik yang dapat membangun dan menjadi penyempurna tesis ini.

5. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku Pembimbing Utama, terimakasih atas kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan, masukan dan saran, arahan, nasehat serta motivasi kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan Tesis secara baik dan maksimal.
6. Seluruh Dosen dan Staf Magister Ilmu Pemerintahan, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada Penulis selama di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan.
7. Terutama dan teristimewa terimakasih untuk kedua orang tuaku yang telah memberikan kepercayaan, dukungan serta doa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk mendukung semua impian penulis.
8. kakak dan adikku terimakasih support yang telah diberikan semoga kita dapat senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan leluhur kita.
9. Terima kasih kepada pamanku Nengah Wenten Sudana dan teman seperjuanganku M. Fajar Novriansyah, Annisa Marchelina, Widiya Novita Lukitasari, Bang Wahir, Dani Pangaribowo, Ulfa Umayasari, Tiyas Apriza dan M. Sidik terimakasih atas motivasi dan semangatnya kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
10. Terima kasih kepada aparaturnya kampung, Lembaga BPK Sangga Buana Kecamatan Way Seputih kabupaten Lampung Tengah beserta staf yang sudah membantu dan mendukung untuk kelancaran tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Pemerintahan 2019 Terima kasih sudah menjadi bagian yang penting dalam masa perkuliahan.
12. Terima kasih untuk Bapak Komandan Satpam PAKSU, Wadan I Bang Akwan, Dedek Fahri, Bang Jasman, Bang Apriyadi Bang Rahmat, Bang Agoy, Bli Wayan, Mas NAS, Bang Nirman, Widya, Rindi, Siska, Adel dan seluruh Anggota Satpam UNILA yang sudah membantu dan mendukung untuk kelancaran tesis ini.
13. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas bantuannya.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 08 Desember 2021

Penulis

Ni Kadek Poniasih



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Efektivitas Pengawasan BPK	
1. Tinjauan Tentang Efektivitas .....	16
2. Badan Usaha Milik Kampung .....	22
a. Pengertian BUMKam .....	22
b. Pendirian dan Pengelolaan BUMKam .....	25
c. Manfaat dan Tujuan Pendirian BUMKam .....	26
B. Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung	
1. Teori Pengawasan .....	12
a. Pengertian Pengawasan .....	12
b. Indikator Pengawasan .....	13
2. Badan Permusyawaratan Kampung .....	15
C. Kerangka Pikir.....	28
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	30
B. Fokus Penelitian .....	31
C. Jenis Data .....	31
D. Informan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Pengolahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Teknik Keabsahan Data .....	37



#### **IV. GAMBARAN UMUM**

A. Sejarah Kampung Sangga Buana .....	39
B. Gambaran Umum Wilayah Kampung Sangga Buana .....	40
C. Profil Penduduk Kampung Sangga Buana .....	41
D. Gambaran Umum Tentang BPK .....	45

#### **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pengelolaan BUMKam Buana Jaya	
1. Perencanaan .....	63
2. Pelaksanaan .....	69
3. Pertanggungjawaban .....	78
B. Efektivitas Pengawasan BPK terhadap Pengelolaan BUMKam.....	53
1. Penetapan Standar .....	53
2. Penetapan pengukuran Standar .....	59
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	61
4. Pengambilan Tindakan Koreksi .....	62

#### **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	81
B. Saran .....	82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel Jenis Usaha BUMKam.....	4
2. Pembentukan BUMKam Kecamatan Way Seputih .....	6
3. Tabel Anggaran BUMKam Tahun 2017-2019 .....	6
4. Tabel Data Informan .....	33
5. Tabel Nama Kepala Kampung.....	40
6. Tabel Jumlah Penduduk .....	41
7. Tabel Berdasarkan Agama .....	42
8. Tabel Mata Pencaharian.....	42
9. Tabel Sarana Prasarana .....	43
10. Tabel Struktur Pemerintah Kampung .....	44
11. Tabel Inventaris Kampung.....	44
12. Tabel Susunan Kepengurusan BUMKam .....	46
13. Tabel Realisasi Pelaksanaan Anggaran BUMKam.....	62
14. Tabel Rincian Struktur BUMKam .....	66
15. Tabel Pembelian Pakan.....	72
16. Tabel Pembelian Sapi .....	73
17. Tabel Anggaran Konter dan Aksesoris Hp .....	75

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

1. Gambar 1. Struktur Organisasi BPK.....	16
2. Gambar 2. Struktur Organisasi BUMK.....	26
3. Gambar 3. Kerangka Pikir .....	29
4. Gambar 4. Musyawarah Kampung .....	54
5. Gambar 5. LPJ Penggemukan Sapi.....	56
6. Gambar 6. LPJ Konter dan Aksesoris Hp.....	57
7. Gambar 7. Buku Pengeluaran Simpan Pinjam.....	58
8. Gambar 8. Buku Simpan Pinjam .....	59
9. Gambar 9. Musyawarah Kampung .....	65
10. Gambar 10. Penggemukan Sapi.....	73
11. Gambar 11. Usaha Konter.....	73

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi desa merupakan kebijakan daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta melakukan upaya pembangunan sehingga dapat meningkatkan derajat masyarakat desa (Adisasmita, 2006:132).

Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu BUMKam yang sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMKam, yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan BUMKam sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMKam merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, BUMKam sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pembentukan BUMKam untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai dengan adat istiadat, kegiatan yang berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat (Gunawan, 2011:61-72).

Keberadaan BUMKam diperlukan untuk menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan BUMKam dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Sayutri, 2011:717-728).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraannya adalah pemerintah Desa, yaitu kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintah Desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, maka pemerintah desa memiliki fungsi salah satunya melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa (Chitary, 2016:59).

Pengelolaan BUMKam sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari Desa, oleh Desa dan untuk Desa dan Pemerintah Desa berperan sebagai pengawasan dan pembinaan sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 9 ayat 1, serta BPK selaku lembaga masyarakat yang terlibat sebagai pengawas dalam pengelolaan BUMKam sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 23 ayat 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 14 Tahun 2015 pasal 36 ayat 2 bahwa kewenangan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas internal yaitu BPK yang dibentuk melalui musyawarah kampung untuk mengawasi pengelolaan BUMK.

Dari data yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Lampung, pendirian BUMKam antara lain dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam peningkatan pendapatan kampung dengan mendayagunakan peranan para masyarakat desa dalam hal pengolahan perekonomian masyarakat desa.

Berikut ini data BUMKam di Provinsi Lampung:

1. Kab. Lampung Tengah (301 desa, 23 Bumkam).
2. Kab. Pesawaran (144 desa, 33 Bumkam).
3. Kab. Lampung Timur (264 desa, 60 Bumkam).
4. Kab. Way Kanan (221 desa, 69 Bumkam).
5. Kab. Pringsewu (126 desa, 53 Bumkam).
6. Kab. Pesisir Barat (116 desa, 31 Bumkam).
7. Kab. Tulang Bawang (147 desa, 145 Bumkam).
8. Kab. Mesuji (105 desa, 105 Bumkam).
9. Kab. Tanggamus (299 desa, 22 Bumkam).
10. Kab. Lampung Selatan (256 desa, 115 Bumkam).
11. Kab. Lampung Utara (232 desa, 24 Bumkam).
12. Kab. Tulang Bawang Barat (93 desa, 93 Bumkam).
13. Kab. Lampung Barat (131 desa, 103 Bumkam).

Keberadaan BUMKam di Kabupaten Lampung Tengah didasari dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. BUMKam di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan tahun 2018 sudah terbentuk sebanyak 301 BUMDes dan 23 BUMKam yang terbentuk dalam beberapa jenis bisnis pelayanan diantaranya:

1. *Bisnis Sosial Pelayanan*: Air minum, usaha listrik, lumbung pangan.
2. *Penyewaan*: Perkakas, gedung pertemuan, tanah milik BUMKam.
3. *Perantara*: Jasa pembayaran listrik, pasar desa.
4. *Trading*: Pabrik es, asap cair, hasil pertanian, saprotan.
5. *Financing*: Kredit atau peminjaman.

Sesuai dengan peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang BUMKam, seperti yang tercantum di pasal 2 dimana pendirian BUMK sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerjasama antar desa. Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMKam sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007). BUMKam dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Usaha yang dijalankan oleh BUMKam di Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

Tabel 1. Jenis Usaha BUMKam Lampung Tengah

No	Unit Usaha	Jenis Usaha
1.	Peternakan	1. Peternakan Sapi 2. Peternakan Kambing 3. Peternakan Ayam Potong 4. Peternakan Bebek 5. Peternakan Murai
2.	Perdagangan	1. Pulsa 2. warung tani 3. Atk 4. Listrik 5. Sembako 6. Pakan Ikan 7. Percetakan fotocopy 8. Jasa internet 9. Air minum
3.	Pertanian	1. Sereh Merah 2. Jamur Merang
4.	Keuangan	1. BRILink 2. Koperasi
5.	Industri Kecil	1. Sandal Jepit 2. Lampu Hias 3. Kopi Bubuk 4. Kerajinan Bambu
6.	Pasar Desa	Pasar Desa
7.	Desa Wisata	Desa Wisata
8.	Penyewaan	1. Tarub 2. Panggung 3. Kios 4. Alat catering
9.	Gas	Gas 3 kg
10.	Perikanan	1. Ikan lele 2. Ikan patin
11.	Bank Sampah	Bank Sampah
12.	Rental Mobil	Rental Mobil

Sumber: Diolah Peneliti 2021

Berdasarkan Tabel 1. Jenis usaha BUMKam di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat diklasifikasikan ke dalam 12 kategori yaitu peternakan, perdagangan, pertanian, keuangan, industri kecil, pasar desa, desa wisata, penyewaan, gas, perikanan, bang sampah dan rental mobil. Kabupaten Lampung Tengah memiliki 183 jenis usaha BUMKam, tahap BUMK yang tumbuh sebanyak 75 unit usaha dan yang berkembang sebanyak 1 unit usaha.

Pro dan kontra mengenai anggaran BUMKam banyak terjadi di kalangan masyarakat. Pihak yang pro terhadap anggaran BUMKam terdiri dari pengelola BUMKam, Pemerintah Desa dan Lembaga Desa. Pengelola BUMKam merencanakan program apa yang akan dilaksanakan untuk memajukan perkembangan BUMKam, pemerintah desa bertugas untuk mengawasi perkembangan BUMKam untuk meningkatkan perekonomian desa sedangkan Pihak yang kontra terhadap BUMKam adalah masyarakat alasannya adalah sumber daya manusia setiap desa sudah pasti beda sangat khawatir akan banyak pengurus/pemerintah desa yang terjerat kasus dari pengelolaan uang BUMKam jika tidak hati-hati dalam menggunakannya dan kemampuan aparatur desa serta BPK dalam pengawasannya yang rendah.

Ketika pengelolaannya salah, baik dilakukan dengan sengaja ataupun ketidaktahuan maka kepala desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan tersebut sehingga peran manajemen disini sangat penting dalam mencapai tujuan pemerintahan desa dalam mendirikan BUMKam yaitu untuk meningkatkan PAD, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan perekonomian.

Kampung Sangga Buana merupakan bagian dari beberapa kampung yang ada di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan Kampung Sangga Buana merupakan kampung yang pertama kali mendapatkan BUMKam di tahun 2016 dibandingkan dengan kampung-kampung lainnya, tetapi perkembangan BUMKam di Kampung Sangga Buana sangat pasif baik dalam

pelaksanaan pengelolaannya dan pertanggungjawabannya di antara desa lainnya, dibuktikan dengan tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 2. Pembentukan BUMKam Kecamatan Way Seputih

Nama Kampung	Nama Bumdes	Penyertaan Modal (2016-2020)	No. PerKam	Jenis Usaha
Sri Busono	Mekar Harapan	100.000	02 Tahun 2017	Percetakan dan konter
Sri Budaya	Harapan Jaya	95000.000	01 Tahun 2017	Budidaya Sapi
Suko Binangun	Karya Mandiri	61.000.000	02 Tahun 2017	Penyewaan GSG
Sangga Buana	Buana Jaya	175.306.824	06 Tahun 2016	Jasa Keuangan

Sumber: verifikasi BUMKam 2020

Jika dilihat dari Tabel 2. Salah satu permasalahan yang muncul yaitu dalam anggaran BUMKam Buana Jaya adalah masalah pengawasan BPK dan aspek apa saja yang perlu diawasi dalam pengelolaan BUMKam. Dalam Dokumen Peraturan Kampung Nomor 06 tahun 2019 tentang pengembangan BUMKam di Kampung Sangga Buana tercantum 3 unit usaha BUMKam yaitu: peternakan sapi, perdagangan dan simpan pinjam dengan jumlah anggaran Rp.183.877.000 tetapi tidak sesuai dengan pelaporan validasi data BUMKam di kecamatan Way Seputih yaitu BUMKam sangga buana yang bergerak di bidang jasa keuangan sebesar Rp.175.306.824 pada tahun 2020.

Lampiran rincian Anggaran BUMK Buana Jaya di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Tahun 2017-2019, sebagai berikut:

Tabel 3 : Dana Desa untuk Pengelolaan BUMK Buana Jaya

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Jenis Usaha	Terealisasi
1	2017	Rp.95.000.000	Penggemukan Sapi	YA
2	2018	Rp.33.877.000	Konter dan aksesoris Hp	YA
3	2019	Rp. 55.000.000	Simpan Pinjam	YA

Sumber : APBK tahun 2017-2019

Berdasarkan Tabel 3. Diketahui bahwa, anggaran BUMKam Buana Jaya di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun digunakan untuk usaha peternakan dan perdagangan yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Peternakan

Membentuk Kelompok Peternak Kampung serta memberikan ilmu dan metode beternak yang baik dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Untuk saat ini BUMKam Buana Jaya di Kampung Sangga Buana bergerak di bidang peternakan yaitu penggemukan sapi yang dimulai pada tahun 2017 sampai sekarang, saat itu BUMKam diketuai oleh bapak Suwal, awal penggemukan sapi yaitu 10 ekor sapi Bali dengan jumlah anggota 2 orang, seiring berjalannya waktu perkembangan sapi semakin hari semakin melemah dan kini sampai tahun 2020 jumlah sapi yang dimiliki BUMK Buana Jaya belum jelas.

b. Perdagangan

Menjalankan bisnis fotocopy, print dan ATK serta kebutuhan masyarakat desa. BUMKam Buana Jaya yang bergerak dibidang foto copy, print dan ATK serta kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh salah satu anggota BUMKam yaitu Habib Mustofa. Berikut hasil wawancara dari Habib Mustofa “ Modal awal untuk mengelola warung (fotocopy, print ATK dan kebutuhan masyarakat) sebesar Rp. 33.800.000 dengan sistem modal awal dibelanjakan semua buat perlengkapan warung, setelah terjual modal diputar kembali untuk membeli barang. Laporan bulanan dilakukan setiap 6 bulan sekali dan sampai saat ini kas dari laba sebesar 5 juta (diluar modal).

c. Simpan Pinjam

BUMKam Buana Jaya yang bergerak dibidang unit usaha simpan pinjam pada tahun 2019 yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Anggaran dana yang digunakan pada modal awal diperoleh dari APBKam senilai Rp.55.000.000, sistem pengembalian dari simpan pinjam yaitu setiap 1 tahun sekali dengan bunga 10% / tahun.

Potensi masalah yang akan muncul dalam pengelolaan dalam jangka panjang yaitu dengan adanya ketidakselarasan ini adalah adanya tindakan kecurangan di Pengelola BUMKam yang cukup tinggi, penyalahgunaan dana BUMKam, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan nampak pada penyajian laporan keuangan (laporan APBKam) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Potensi kecurangan pengelolaan BUMKam ini, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga pengelolaan dana BUMKam dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Seluruh instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dalam pengawasan dana BUMKam, baik Pemerintah Desa, Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kampung.

Penelitian Fitriksa (2017), hasil penelitiannya yang berjudul Pengembangan BUMKam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berjalan dengan maksimal antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai BUMKam serta masyarakat belum dapat merasakan manfaat dari keberadaan BUMKam.

Penelitian Yudiardi (2015), hasil penelitiannya adalah sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif sehingga berimplikasi pada Predikat Daerah Tertinggal Strategi penguatan ekonomi desa melalui BUMKam, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah. BUMKam, merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi Pemerintah, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu serta dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang strategis di desa. Selain itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, BUMKam diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan.

Penelitian Redana (2018), hasil penelitiannya adalah peran perencanaan pembangunan Desa Tejakula dalam memberdayakan BUMKam Tejakusuma, pertama bertujuan menanggulangi pengangguran, dapat berfungsi sebagai *stabilisator*, *innovator*, *modernisator*, pelopor dan pelaksana, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kedua peran BUMKam dalam pengembangan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan pengangguran, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang BUMKam. Perbedaannya penelitian terdahulu mengkaji faktor yang menghambat perkembangan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perencanaan pembangunan dalam memberdayakan BUMKam sedangkan penelitian ini mengkaji lebih mendalam terkait Pengawasan BPK terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMKam.

Setiap wilayah maupun desa tertentu memiliki karakteristik masing-masing baik dari segi geografis maupun kondisi sosialnya, hal ini mengakibatkan pengawasan BPK dalam pengelolaan BUMKam pun pasti berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan BPK dan aspek yang perlu diawasi dalam pengelolaan BUMKam Buana, mengelola dan memanfaatkan kekayaan-kekayaan yang menjadi aset Desa Sangga Buana di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang menyatakan bahwa efektifitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan BUMKam adalah hal yang penting untuk dikaji. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan BUMKam Buana Jaya di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Tengah?
2. Bagaimana Efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan BUMKam Buana Jaya di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian yaitu:

1. Mendeskripsikan serta menganalisis pengelolaan BUMKam Buana Jaya.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Efektivitas pengawasan BPK terhadap Pengelolaan Anggaran BUMKam Buana Jaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Sebagai referensi tambahan khasanah ilmu pemerintahan dalam studi Efektivitas Pengawasan BPK Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMKam. Penelitian ini akan menjadi sebuah gambaran atau informasi untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas BPK untuk meningkatkan pengelolaan pada BUMKam yang pada akhirnya dapat dipergunakan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam mengelola BUMKam.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Pengawasan BPK Terhadap Pengelolaan BUMKam, dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pengelola BUMKam untuk faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam pengelolaan BUMKam Buana Jaya dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam peningkatan kinerja BUMKam, pengelolaan BUMKam, dan meningkatkan peran BUMKam dalam mensejahterakan masyarakat di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Efektivitas Pengawasan BPK**

#### **1. Efektivitas Pengawasan**

Pengertian efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif apabila kegiatan yang ada mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Munir dkk. 2004:43)

Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat indikator pengawasan (Penetapan standar, Penilaian hasil kerja, Kesesuaian hasil dan tindakan koreksi) apakah sesuai tujuan pengawasan. Efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan BUMKam di katakan efektif apabila 4 indikator dan tujuan pengawasan diatas sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan, jika 4 indikator tersebut tidak memenuhi tujuan pengawasan maka efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan BUMKam tersebut tidak efektif.

Secara umum masih terdapat beberapa masalah dalam pengawasan BPK. Permasalahan pengelolaan menurut Firdausy (2018:68) dapat dikelompokkan serta dianalisis dalam 3 kelompok utama yaitu:

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan pada indikator ini, ingin mengetahui bagaimana perencanaan yang dilakukan BPK untuk memperoleh pengawasan yang maksimal. Banyak hal yang mungkin direncanakan oleh BPK

dan rencana-rencana apa saja yang menjadi fokus untuk dikembangkan untuk memperoleh perencanaan yang efektif.

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. pada hakikatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang perencanaan, maka perencanaan dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku (pengelolaan BUMKam) dengan tujuan tertentu yaitu untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi secara nyata berupa program-program untuk memecahkan masalah tersebut. Perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh tim pengawas BUMKam di Kampung Sangga Buana dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Tahap Perencanaan ada beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

- a. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, notulen rapat).
- b. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang BUMK berdasarkan RKPDesa tahun yang berlaku dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- c. Ketua Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan bersama pemerintah desa.
- d. Sekretaris BUMKam Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pada indikator ini, ingin mengetahui bagaimana implementasi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dalam indikator ini juga akan mengetahui bagaimana koordinasi antar unit usaha yang terkait dengan pengawasan dalam pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, dan mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pemahaman peneliti bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sesuai dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun diluar lapangan. Kegiatannya yang melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Tahap pelaksanaan memiliki beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

c. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pada indikator ini, apa yang sudah direncanakan dan diimplementasikan dilihat bagaimana kesesuaian dengan pertanggungjawaban. Ketidaksesuaian pelaksanaan yang terjadi bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana . ketidaksesuaian pelaporan pertanggungjawaban akan menyebabkan kerugian pada BUMKam dan seperti apa pertanggungjawaban yang dihasilkan dari hal tersebut dan dimana letak pengawasan jika hal itu terjadi.

Berdasarkan pernyataan di atas pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh BPK sebagai pengawas

Pengelolaan BUMKam di Kampung Sangga Buana. Indikator untuk menjamin akuntabilitas tahap pertanggungjawaban yaitu keuangan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam BUMK.

Berdasarkan analisis 3 kelompok utama di atas akan menghasilkan faktor apa saja yang menjadi hambatan, masalah atau kelebihan yang ada pada pengawas di Kampung Sangga Buana. Kemudian, setelah adanya analisis tersebut dapat mengetahui hambatan dan masalah dalam pengawasan BUMKam Buana Jaya di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dapat dibagi menjadi 3 pengelompokan yaitu menurut Firdausy (2018:68) yaitu: 1). Perencanaan, 2). Pelaksanaan, 3) Pertanggungjawaban.

## **2.Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)**

### **a. Pengertian BUMKam**

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Putra, 2015:11).

Pengaturan mengenai pendirian BUMK diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 135-152.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Kamaroesid, 2016:86).

BUMKam merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMKam dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. BUMKam adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008:35).

Tujuan BUMKam adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMK memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMKam telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi *Asean Economic Community 2015* (Alkadafi, 2014).

Ciri utama BUMKam yang membedakan lembaga komersial lain (PKDSP, 2007) adalah:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPK, anggota).

BUMKam sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, ini berarti pemenuhan modal usaha BUMKam harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMKam dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMKam, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

#### b. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung

##### 1. Pendirian BUMKam

Pendirian BUMK didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan sebagai berikut:

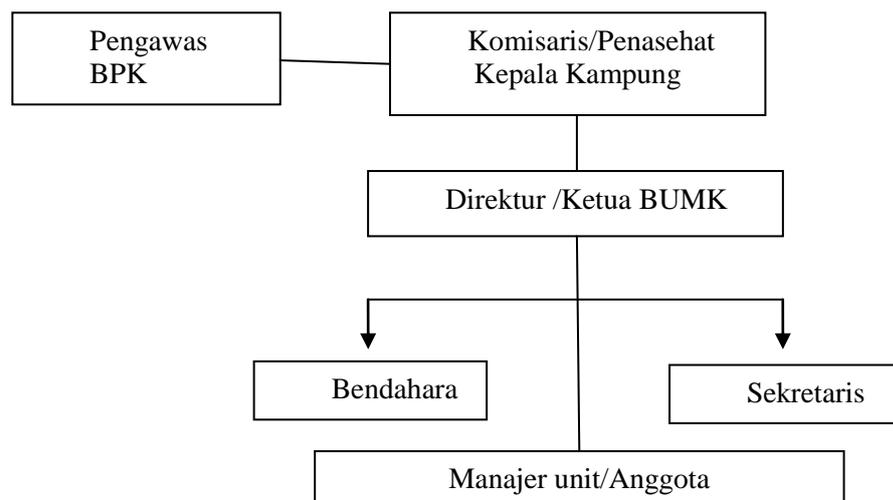
- a. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa.
- b. Potensi usaha ekonomi desa.
- c. Sumber daya alam di desa.
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMK.
- e. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMKam.

Pendirian BUMKam harus disepakati melalui musyawarah desa. Musyawarah desa atau disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menemptati hal yang bersifat strategis (Wijaya, 2018-135-139).

## 2. Pengelolaan BUMKam

Organisasi pengelola BUMKam hendaklah dilakukan secara terpisah dari organisasi pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMK terdiri dari:

- a. Penasihat
- b. Pelaksana operasional
- c. Pengawas



Gambar 2. Struktur Organisasi BUMK

Sumber :Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan bahwa susunan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMK).

### 3. Manfaat dan Tujuan Pendirian BUMK

Manfaat pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan sumber pendapatan Asli Desa.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Adapun Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber sumber pendapatan lain yang sah.
- b. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa.
- c. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- d. Meningkatkan kreativitas berwirausaha dan masyarakat desa yang berpenghasilan.
- e. Unit Usaha BUMK Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMK antara lain: Pasar desa, Waserda, Transportasi, *home* industri, perikanan darat, pertanian, simpan pinjam, sumber air, obyek wisata desa, kerajinan rakyat, peternakan, dan agroindustri.

BUMKam dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di perdesaan. Oleh karena itu, di dalam BUMKam dapat terdiri dari beberapa unit usaha berbeda-beda. Ini sebagaimana ditunjukkan pada contoh struktur organisasi BUMKam yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu Unit Perdagangan, Unit Jasa Keuangan, dan Unit Produksi. Unit usaha yang berada di dalam BUMKam secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Unit jasa keuangan, misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
- b. Unit usaha sektor riil/ekonomi, misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waseda, foto copy, sablon, *home* industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, dll.

Perkembangan BUMK dikatakan efektif apabila tingkat keberhasilan mencapai sasaran begitupun sebaliknya jika tingkat keberhasilan BUMK lemah tidak sesuai dengan sasaran maka tidak efektif. Hal tersebut didukung oleh teori efektivitas yang diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Sedangkan efisiensi adalah 12 perbandingan terbaik antara input dan output, atau sering disebut rasio input dan output (Hendarsah,2009:211).

## **B. Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung**

### **1. Teori Pengawasan**

#### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan suatu serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pengawasan juga dapat diartikan sebagai pencarian informasi mengenai berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan. Dalam konsepsi pemerintah pengawasan dilakukan secara intern oleh suatu lembaga, dalam hal ini BPK memiliki peranan yang aktif dalam segi pengawasan di dalam BUMKam dalam hal pencapaian tujuan kebijakan yang tepat akan membawa hasil yang sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Malayu, 2002:64). Pengawasan adalah suatu proses dimana

pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapat keyakinan atau menjamin tujuan organisasi dan rencana-rencana yang digunakan berjalan dengan baik. Pengawasan pada hakikatnya merupakan fungsi yang melekat pada suatu lembaga baik pemerintah atau swasta yang berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan atau kinerja kerja. Sehingga Pengawasan ialah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan (Huda, 2007:33).

Pengawasan diadakan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.

#### **b. Indikator Pengawasan**

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi Pandoyo (2007:109) merumuskan proses atau langkah-langkah yang dapat digunakan sebagai indikator dalam proses pengawasan meliputi:

1. Penetapan Standar.

Standar terlebih dahulu harus ditetapkan dan satu model atau suatu ketentuan yang telah diterima bersama atau yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.

2. Penetapan Pengukuran Standar

Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan. Penilaian yang dilakukan oleh pengawas dengan melihat hasil kerjanya dan laporan tertulisnya, ini dapat dilakukan dengan melalui antara lain laporan (lisan atau tertulis), buku catatan harian tentang bagan jadwal atau grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan/konferensi dengan petugas-petugas yang bersangkutan survei yang dilakukan oleh tenaga staf ahli atas badan tertentu.

3. Pengukuran Pelaksanaan Standar membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan standar yang ada untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi. Ini dilakukan untuk perbandingan antara hasil pengukuran dengan standar, dengan tujuan untuk mengetahui apakah diantaranya terdapat suatu perbedaan dan jika ada seberapa besarnya perbedaan kemudian menentukan perbedaan itu perlu diperbaiki atau tidak.

4. Tindakan Koreksi Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Melakukan tindakan koreksi/perbaikan bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, standar mungkin diubah dan pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan.

Indikator efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan BUMK dapat dikatakan efektif apabila empat indikator dan tujuan pengawasan diatas sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dan biasanya sesuai dengan prinsip fleksibilitas, jika empat indikator dan 5 tujuan pengawasan tersebut tidak memenuhi standar maka pengawasan pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMK tersebut tidak efektif.

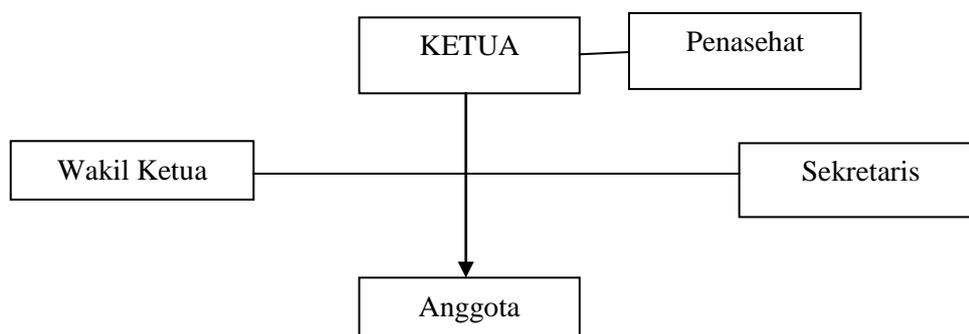
## **2. Badan Permusyawaratan Kampung**

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintah desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur lembaga penyelenggara pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.

BPK merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, BPK dianggap sebagai parlemennya desa dan merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPK ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat (Soekanto, 2004:219).

BPK merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPK adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pada umumnya yang dipilih menjadi anggota BPK terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPK adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPK tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Fungsi BPK menyusun, mengawasi dan menetapkan. (Langoy, 2016:1).

Fungsi BPK sebagai pengawas dalam Permendagri No 10 Tahun 2010 pada bab V Pasal 23 ayat (1) BPK /pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMK , jadi BPK bertanggung jawab dalam pengawasan BUMKam Buana Jaya di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Adapun struktur organisasi BPK Yaitu sebagai Berikut.



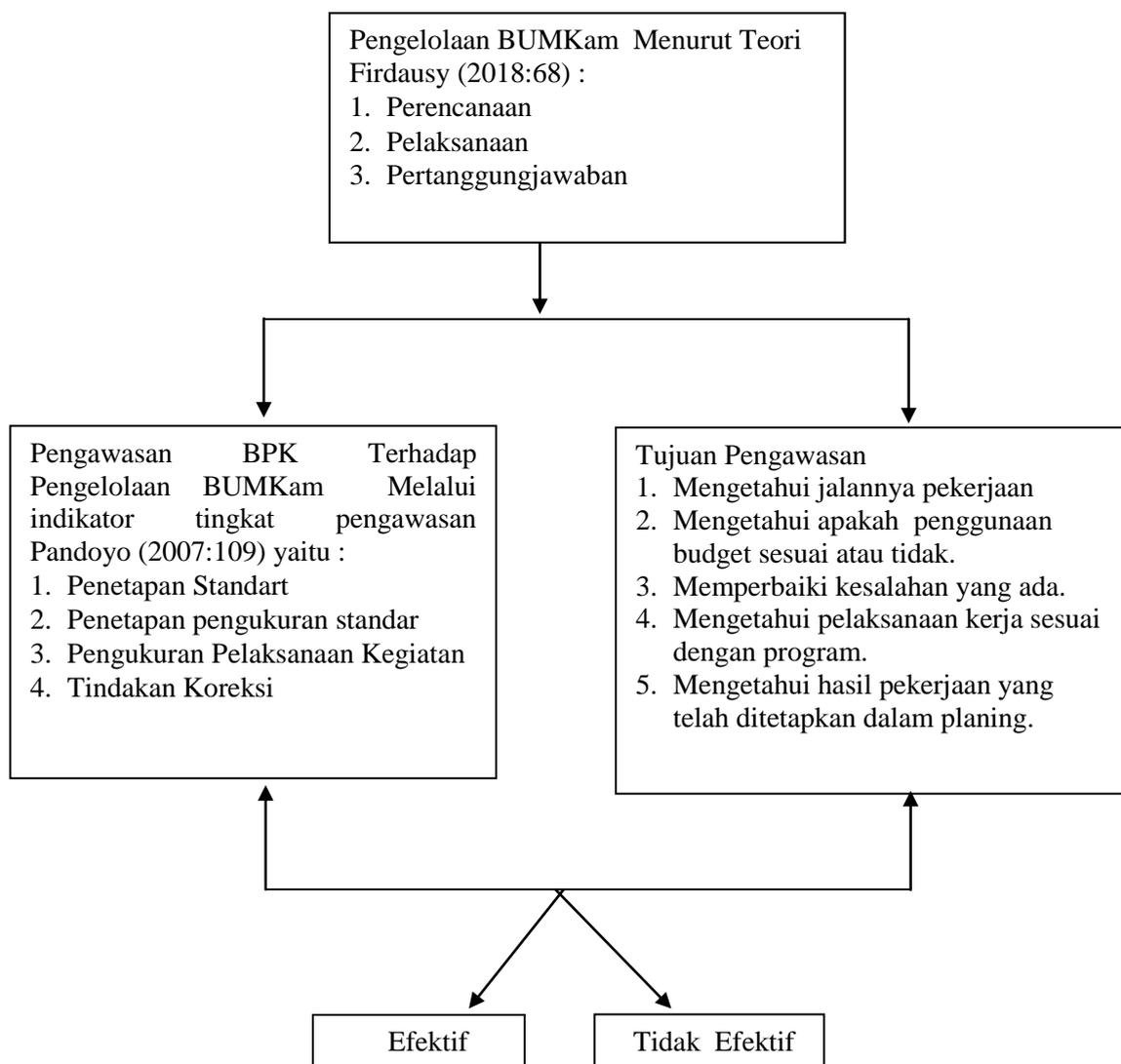
Gambar 1 : Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)  
Sumber: Diolah Peneliti 2021

### C. Kerangka Pikir

Kampung Sangga Buana merupakan bagian dari beberapa kampung yang ada di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan Kampung Sangga Buana merupakan kampung yang pertama kali mendapatkan BUMKam di tahun 2016 dibandingkan dengan kampung-kampung lainnya, tetapi perkembangan BUMKam di Kampung Sangga Buana sangat pasif baik dalam pengelolaannya dan pengawasan di antara kampung lainnya.

Indikator pengelolaan BUMKam dan Efektivitas pengawasan dipilih karena paling sesuai dan dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai Efektivitas Pengawasan BPK terhadap Pengelolaan BUMKam. Setelah dinilai dari berbagai hal tersebut, maka akan terlihat bagaimana efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan BUMKam di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Melalui

indikator tersebut dapat kita ketahui apakah Badan Permusyawaratan Kampung terhadap pengelolaan BUMKam sudah efektif atau tidak efektif dalam pengawasannya, maka dapat dikembangkan model kerangka pikir dari penelitian ini seperti berikut:



**Gambar 3. Kerangka Pikir**  
**Sumber : Diolah peneliti 2021**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan BUMKam Buana Jaya dan bagaimana Efektivitas Pengawasan BPK Terhadap Pengelolaan BUMK Buana Jaya di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan dari objek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong & Lexy, 2017:45).

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena fenomena yang diteliti mengenai Efektivitas Pengawasan BPK Terhadap Pengelolaan BUMKam Buana Jaya memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan yang bersifat mendalam karena pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Pendekatan kualitatif alasan yang kedua, permasalahan ini untuk mengetahui Pengawasan BPK terhadap pengelolaan BUMK dan efektif atau tidaknya pengelolaan BUMK Buana Jaya Tahun 2020.

## **B. Fokus Penelitian**

Titik utama dalam penelitian kualitatif adalah terletak pada masalah dan fokus penelitian. Fokus penelitian berperan sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian juga sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak pada melimpahnya volume masalah penelitian, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Spradley mengemukakan bahwa fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2016:208).

Penulis memilih fokus efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan BUMKam dan Pengelolaan BUMKam Buana Jaya di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, hal ini dianggap penting karena pengawasan BPK akan mempengaruhi proses pengelolaan BUMKam yang akan ditinjau dengan indikator pengawasan penetapan standar, penilaian hasil kerja, kesesuaian hasil dan tindakan koreksi (Pandoyo 2007:109) serta pengelolaan BUMKam Buana Jaya dengan 3 aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Firdausy 2018:68).

## **C. Jenis Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. (Lofland dalam Moleong, 2005:157).

### 1. Data Primer

Pada penelitian ini data primer yang akan didapat yakni yang terkait dengan efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan BUMKam di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih kabupaten Lampung tengah yang ditinjau dari indikator pengawasan yaitu penetapan standar, penetapan pengukuran standar, Kesesuaian hasil, hasil koreksi dan pengelolaan BUMKam yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer. Data tersebut berguna untuk memperkuat data dari data primer yang berupa:

- a. Laporan Realisasi APBKam Kampung Sangga Buana.
- b. Laporan Realisasi BUMKam Kampung Sangga Buana.
- c. Profil Kampung Sangga Buana.

## **D. Informan**

Menurut Bagong dan Sutinah yang dimaksud dengan informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian (Bagong, 2007:171-172), Moleong menyatakan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang latar penelitian (Moleong, 2011:15).

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono,2012:208). Penulis menentukan 12 informan dengan menggunakan beberapa kriteria yaitu dengan pertimbangan tertentu sehingga diperoleh gambaran informan sebagai berikut:

- a. informan yang mengetahui secara baik tentang peristiwa atau kejadian dalam pengelolaan BUMKam dan fungsi BPK dalam pengawasan BUMKam Buana Jaya di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Informan terlibat dalam kepengurusan BUMKam Buana Jaya di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way seputih Kabupaten Lampung Tengah.
- c. informan yang aktif dalam mengikuti kegiatan BUMKam Buana Jaya di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.

Informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* yaitu:

Tabel 4. Data informan dalam penelitian

NO	Jabatan	Nama
1	Kepala Kampung	Sarjono
2	Sekretaris Kampung	Wayan Sutanto
3	Bendahara Kampung	Diran
4	Ketua BPK	Grantang Widodo
5	Ketua BUMK	Swaljo
6	Tokoh Masyarakat	Wayan Sudira
7	Ketua Unit Usaha Peternakan	Agung Wibowo
8.	Ketua Unit Usaha Perdagangan	Iswanto
9	Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam	Minarto
10	Camat	Ahmadi, SE
11	Masyarakat	Wayan Sudiarta
12	Masyarakat	Gita

Sumber: Diolah Peneliti 2020.

Berdasarkan Tabel 4. Alasan Peneliti memilih informan di atas karena memilih orang yang dianggap paling tahu tentang BUMKam Buana Jaya di Kampung Sangga Buana dan informan di atas dianggap sudah cukup mewakili seluruh orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan BUMKam Buana Jaya. Alasan Peneliti melibatkan tokoh masyarakat yaitu ingin mengetahui bagaimana tanggapan tokoh masyarakat mengenai Perkembangan BUMKam Buana Jaya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018:38). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi, yaitu sebagai berikut:

### 1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara diarahkan untuk mendapatkan jawaban serta gambaran secara rinci terkait efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan BUMKam melalui indikator pengawasan (penetapan standar, penetapan pengukuran standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengambilan tindakan koreksi) dan pengelolaan BUMKam (Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban) di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Wawancara ini dijadikan sebagai data primer yang merupakan sebuah proses yang akan penulis gunakan untuk mendapatkan gambaran efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan BUMKam, yang akan secara langsung ditanyakan dengan informan secara mendalam.

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016:231). Penelitian ini menggunakan wawancara dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Konsep di atas Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan agar memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian langsung dari narasumber yang bersangkutan sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung dan secara timbal balik. Memperoleh data dan informan yang valid dan akurat maka dilakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 informan yang dijadikan sumber informan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219).

Konteks penelitian ini, teknik studi dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis, dokumen yang dimaksud yaitu dokumen yang berkaitan dengan Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti akurat penelitian bahwa peneliti benar-benar melakukan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode dan jawaban atas panduan wawancara yang peneliti susun memang berdasarkan jawaban narasumber. Dokumentasi juga menjadi acuan peneliti untuk melihat data- data berupa fenomena yang diabadikan dalam jangka waktu yang belum begitu lama.

## 3. Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada objek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Observasi dilakukan pada tanggal 03 Mei-25

Mei 2020 guna mengetahui pengamatan lebih akurat, apakah hasil wawancara selaras dengan kenyataan yang ada di Kampung Sangga Buana.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Menurut Surakhmad (dalam Idrus (2007:78)) Teknik pengolahan data merupakan teknik operasional yang dilakukan pada saat setelah data terkumpul. Beberapa tahap pengolahan data pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, dan wawancara adalah *Editing* yaitu teknik mengolah data dengan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi agar menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap editing yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku dan bahasa yang mudah dipahami.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti yaitu mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik. Interpretasi data yaitu upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas. Interpretasi dalam penelitian ini yaitu pembahasan hasil penelitian mengenai Perkembangan BUMKam.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Moleong (2011:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain, dalam penelitian ini teknik analisis data yang akan digunakan adalah:

1. Reduksi data yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan data kasar yang dapat dilapangan. Peneliti melakukan reduksi data dimulai saat penelitian, yaitu dengan wawancara selanjutnya dilakukan pencatatan dan mengolah data-data yang harus ditampilkan dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga peneliti dapat menjelaskan dan memahami latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Reduksi data kemudian dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas guna menjawab pertanyaan yang akan diajukan peneliti.
2. Penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan berupa teks naratif yaitu disertai dengan bagan dan tabel yang sesuai dengan penelitian.
3. Penarikan kesimpulan digunakan untuk membuat data yang lebih rinci terhadap hasil dari pengumpulan data-data yang berhubungan dengan Perkembangan BUMK Buana Jaya.

#### **H. Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2016:246). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang dikembangkan oleh Denzim ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik serta teori (Moleong 2017:331). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Triangulasi sumber peneliti menggunakan berbagai sumber seperti Undang-undang tentang Peraturan Desa, Perda Tentang BUMKam, dokumen, arsip dan berita online.
2. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMKam .

Melihat keabsahan data Peneliti menggunakan triangulasi data yaitu menggabungkan hasil wawancara dan dokumentasi tentang fokus penelitian sesuai dengan teori yang digunakan. Keabsahan data yang digunakan bertujuan untuk mencari kebenaran dari tiga metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti ketika melakukan penelitian.

## IV.GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Kampung Sangga Buana

Seperti Kampung-kampung transmigrasi lainnya di daerah Lampung khususnya Lampung Tengah, maka Kampung Sangga Buana pada awal mulanya merupakan hutan belukar, pada tahun 1959 wilayah Sangga Buana di buka oleh jawatan transmigrasi. Berjalan Selama lima tahun lokasi tersebut masih hutan dan belum di tempati oleh manusia/masyarakat. Tahun 1964 tepatnya 20 Januari 1964 oleh pemerintah melalui Jawatan Transmigrasi di datangkan rombongan transmigrasi dari Bali, akibat Gunung Agung meletus. Kedatangan rombongan transmigrasi saat itu melalui 2 tahap yaitu : 1) dengan jumlahnya rombongan 121 KK dengan ketua rombongan Nengah Sukarya. 2) dengan jumlah rombongan 244 KK, dengan ketua rombongan I Wayan Laba.

Nama Sangga Buana diambil dari singkatan SB yang pada saat itu oleh masing-masing rombongan Bali memberi nama, salah satunya Kampung Sangga Buana, sedangkan 12 adalah no urut dari jumlah kampung yang ada di Kecamatan Pembantu di Seputih Banyak, yang nomor urut itu adalah pemberian dari Jawatan Transmigrasi. Sangga Buana adalah singkatan dari SB dan 12 adalah nomor urut jumlah Kampung di Kecamatan Pembantu Seputih Banyak yang diberikan oleh Jawatan Transmigrasi.

Kampung Sangga Buana merupakan salah satu kampung di Kecamatan Way Seputih yang mulai diresmikan pada tahun 1964 sesuai dengan Perda. No.22 Tahun 1999, hal ini mengacu pada UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Berikut nama Kepala Kampung Sangga Buana yang pernah menjabat sampai saat ini :

Tabel 5. Nama-nama Kepala kampung di Kampung Sangga Buana

No	Nama	Jabatan	Tahun
1	I Wayan Laba	Kepala Kampung	1964-1968
2	Samsudin	Kepala Kampung	1968-1973
3	Suwardi	Kepala Kampung	1973-1985
4	I Wayan Mandar	Pjs	1987-1989
5	Wakidi	Kepala Kampung	1990-1994
6	I Wayan Mandar	Kepala Kampung	1994-1999
7	Sarjono	Kepala Kampung	1999-2001
8	Ketut Mudiana	Pjs	2003-2006
9	Nyoman Budiono	Kepala Kampung	2007-2013
10	Nyoman Budiono	Kepala Kampung	2013-2019
11	Sarjono	Kepala Kampung	2020-2025

Sumber : Diolah Oleh peneliti tahun 2021

## B. Gambaran Umum Wilayah Kampung Sangga Buana

### 1. Luas dan Batas Wilayah Kampung Sangga Buana

Pada monografi Kampung Sangga Buana, luas tanah Kampung Sangga Buana adalah 1.851 Ha dengan jumlah penduduk 2884 jiwa dengan 621 Kepala Keluarga (KK). Adapun batasan wilayah Kampung Sangga Buana :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan alam atau sungai
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Rekso Binangun Kec. Rumbia
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sakti Buana ( SB 13)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sri Busono ( SB 10)

Kampung Sangga Buana terdiri dari V Kepala Urusan ( Kaur), VI (Enam) Dusun dan 16 Rukun Tetangga (RT).

## 2. Orbitasi Kampung Sangga Buana

Jarak tempuh dari Kampung Sangga Buana ke pusat pemerintahan adalah :

- a. Jarak Pemerintahan Kampung Sangga Buana dengan Kecamatan Way Seputih  $\pm$  5 KM
- b. Jarak Kampung Sangga Buana dengan Ibu Kota Bandar Lampung yaitu  $\pm$  128,5 KM

### C. Profil Penduduk Kampung Sangga Buana

#### 1. Keadaan umum penduduk

Jumlah penduduk di Kampung Sangga Buana pada tahun 2020 adalah 2.884 jiwa, yang terdiri dari 1.301 jiwa laki-laki dan 1.583 jiwa perempuan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Penduduk di Kampung Sangga Buana

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.301
2.	Perempuan	1.583
	Jumlah	2.884

Sumber: Monografi kampung sangga Buana

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kampung Sangga Buana didominasi oleh penduduk laki-laki dibanding dengan penduduk perempuan.

#### 2. Keadaan Penduduk berdasarkan Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat di Kampung Sangga Buana terdiri dari 3 Agama yaitu agama Islam, agama Hindu dan agama Kristen. Mengenai jumlah penduduk di Kampung Sangga Buana berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Berdasarkan Agama Yang Dianut

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.981
2	Hindu	857
3	Kristen	46
Jumlah		2.884

Sumber : Monografi Kampung Sangga Buana

Berdasarkan Tabel 7. Menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kampung Sangga Buana beragama Islam dengan jumlah 1.981 jiwa, yang kedua adalah agama Hindu dengan jumlah 857 jiwa dan selanjutnya agama Kristen dengan jumlah 46 jiwa.

### 3. Keadaan penduduk berdasarkan Mata pencaharian

Penduduk Kampung Sangga Buana hampir sebagian besar bekerja sebagai petani, wiraswasta, buruh dan PNS dan lain-lain. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	2000 orang
2	Wiraswasta	20 orang
3	Buruh	200 orang
4	PNS	10 orang
JUMLAH		

Sumber : Monografi Kampung Sangga Buana

Berdasarkan tabel 8. dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kampung Sangga Buana sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dengan jumlah 2000 jiwa. Sedangkan yang paling rendah adalah mata pencaharian sebagai PNS dengan jumlah 10 jiwa.

### 4. Sarana dan Prasarana

Kampung Sangga Buana mempunyai sarana dan prasarana yaitu :

- a. Sarana ibadah, seperti pura, mushola dan masjid
- b. Sarana kesehatan, seperti bidan kampung, posyandu

- c. Sarana pendidikan, seperti Paud, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Taman Pendidikan Al Quran (TPA), dan pendidikan agama.

Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kampung Sangga Buana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9. Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Tempat Ibadah	28
2	Sarana Kesehatan	2
3	Sarana Pendidikan	3
JUMLAH		

Sumber : Profil Kampung sangga Buana, 2021

Pada keterangan tabel 9, dapat dilihat bahwa Kampung Sangga Buana mempunyai tempat ibadah Masjid/Mushola 20, dan Pura 8 kemudian , sarana kesehatan 2, sarana pendidikan 3. Semua sarana dan prasarana tersebut tersebar di Dusun I,II,III,IV,V,dan,VI.

#### 5. Struktur Pemerintahan Kampung Sangga Buana

Jumlah pegawai dari kepala kampung sampai dengan kepala dusun berjumlah 13 orang sebagai berikut:

Tabel 10. Struktur Pemerintahan Kampung Sangga Buana

NO	Nama	Jabatan
1.	Sarjono	Kepala kampung
2.	Wayan Sutanto	Sekretaris kampung
3.	Ngadiran	Kaur Keuangan
4.	Paryono	Kaur Umum dan Perencanaan
5.	Putu Dewantara	Kasi Pelayanan
6.	I Komang Candra	Kasi Pemerintahan
7.	Ngadiran	Kasi Kesejahteraan
8.	Agung Wibowo	Kadus I
9.	Supaidi	Kadus II
10.	Bayu Pramono	Kadus III
11.	Nengah Windu	Kadus IV
12.	Kolili Rohman	Kadus V
13.	Wayan Sudiarta	Kadus VI

Sumber: Laporan Penyelenggara Kampung

## 6. Kekayaan Kampung Sangga Buana

Kampung Sangga Buana mempunyai barang inventaris kampung yaitu:

Tabel 11. Barang Inventaris Kampung

No	Jenis Barang	Jumlah	Unit/Buah/Paket	Kondisi
1	Motor	2	Unit	Baik
2	Meja kantor	8	Unit	Baik
3	Kursi plastik	180	Unit	Baik
4	Komputer	3	Unit	Baik
5	Proyektor	1	Unit	Baik
6	Printer	2	Unit	Baik

Sumber : Profil Kampung Sangga Buana, 2021

Pada keterangan tabel 11, Kampung Sangga Buana memiliki inventaris berupa sepeda motor sebanyak 2 unit, meja kantor 8 unit, kursi plastik sebanyak 180 unit, komputer sebanyak 3 unit, proyektor sebanyak 1 unit dan printer 2 unit.

### D. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Kampung

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah kampung yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan kampung, pemerintah Kampung akan berjalan efektif apabila unsur-unsur lembaga penyelenggara pemerintah kampung dapat berjalan dengan baik. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung.



Gambar 3 : Struktur organisasi BPK Kampung Sangga Buana  
 Sumber : Data Struktur Organisasi Kampung Sangga Buana

Pasal 3 ayat 2 yaitu jumlah anggota BPK ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan kampung dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk dari 2000 Jiwa yaitu 5 Anggota
2. Jumlah penduduk dari 2001 -2500 jiwa yaitu 7 Anggota
3. Jumlah penduduk lebih dari 2500 yaitu 9 orang.

Apabila disesuaikan dengan aturan tersebut maka jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung Kampung Sangga Buana adalah 9 orang, hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan BPK di Kampung Sangga Buana yang jumlahnya hanya 5 orang, dengan ini kinerja pengawasan BPK menjadi tidak efektif. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Kampung adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan berikutnya. BPK sebagai wakil dari masyarakat di dalam pemerintahan kampung memiliki tugas yang cukup berat, di mana Badan Permusyawaratan Kampung harus mampu mengaktualisasikan aspirasi

masyarakat dan apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta masyarakat yang demokratis.

Dari struktur organisasi BPK di Kampung Sangga Buana dapat dilihat bahwa anggota BPK memiliki tingkat pendidikan cukup baik, karena dari kelima anggota tersebut lulusan SMA tentunya dengan tingkat pendidikan yang baik akan membantu kinerja pengawasan BPK dalam menjalankan fungsinya yang berdampak bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way seputih Kabupaten Lampung Tengah.

#### **E. Gambaran Umum Pengelolaan BUMKam Sangga Buana**

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi di tingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Karena sebagian besar di kampung terdapat anggota masyarakat yang tercatat sebagai pengusaha mikro dan kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian regional dan nasional.

Badan Usaha Milik Kampung atau yang sering disebut BUMKam Buana Jaya terletak di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Badan Usaha Milik Kampung Buana Jaya berdiri pada tahun 2016 dengan SK Kepala Kampung No 140/05/BTA/2016, SK Pengurus Nomor 140/102/KPTS/06/SB12/2017, serta dilengkapi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sampai tahun 2020 BUMKam Buana Jaya telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun terakhir.

Berdasarkan penelitian di Kampung Sangga Buana, proses pembentukan BUMKam Buana Jaya melalui musyawarah desa pada tahun 2016 dan mulai beroperasi aktif pada bulan Januari 2017. Pemerintah kampung ikut berperan dalam pembentukan BUMKam Buana Jaya sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, hal ini bertujuan untuk menimbulkan permintaan di pasar agar keberadaan BUMKam tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu yang memiliki modal besar di kampung, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikelola bersama oleh masyarakat desa.

BUMKam Buana Jaya yang diketuai oleh Pak Swaljo secara langsung diawasi oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Sangga Buana. BPK Sangga Buana melakukan pengawasan, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung terhadap pelaksanaan unit usaha BUMKam Buana Jaya. Berikut ini adalah susunan kepengurusan BUMK Buana Jaya yang terbentuk berdasarkan hasil musyawarah kampung Sangga Buana tahun 2016:

Tabel 12. Susunan kepengurusan BUMK

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Grantang Widodo	BPK (Pengawas)	SMA
2.	Sarjono	Penasehat (Kepala Kampung)	SMA
3.	Swaljo	Ketua BUMKam	SMA
4.	Imam Nasrudin	Sekretaris BUMKam	S1 Pendidikan
5.	Habib Mustofa	Bendahara BUMKam	S1 Akutansi
6.	Unit 1 Bidang Simpan Pinjam 1. Kepala Bidang 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Anggota	Agung Wibowo Ida Bagus Hartawan Wayan Sutanto Wayan Sudiarta	SMA SMA SMA SMA

Lanjutan

7.	Unit 2. Bidang Warung 1. Kepala Bidang 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Anggota	Iswanto Nyoman Sudiarta I Wayan Tirta Suweta Supaidi	SMA SMA SMA SMA
8.	Unit 3 bidang Peternakan 1. Kepala Bidang 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Anggota	MINARTO Wayan Ayu P I Ketut Mudiana Kholili Rohman	SMA SMA SMA SMA

Sumber: BUMK Buana Jaya 2021.

Berdasarkan tabel 12. Struktur BUMK Buana Jaya Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah sewaktu-waktu dapat berubah jika terjadi penambahan unit usaha ataupun penambahan pengurus BUMK. Tugas dari susunan kepengurusan BUMKam Buana Jaya yaitu sebagai berikut:

Tugas dan kewenangan pengelolaan BUMKam yaitu sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang BPK (Pengawas)

Tugas Pengawas

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan BUMKam
- b. Menerima dan memeriksa laporan bulanan, triwulan atau per semester dan laporan tahunan pengurus.

Wewenang Pengawas

- a. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan BUMKam yang diajukan pengurus.
- b. Meminta keterangan kepada pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan BUMKam.
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala kampung baik diminta maupun tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan BUMKam.

## 2. Tugas dan wewenang komisaris/ Kepala Kampung

### Tugas komisaris

- a. Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMK
- b. Memberi saran atau pendapat mengenai masalah atau yang dianggap penting bagi pengelola BUMKam
- c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan
- d. Melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan BUMKam meliputi alur dan mekanisme pelaksanaan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan perkembangan BUMKam minimal satu kali dalam satu tahun dalam forum musyawarah kampung bagi BUMKam.
- f. Melaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUMKam apabila telah mendapat evaluasi yang terdapat temuan diantara pengurus BUMKam telah melakukan penyelewengan dana atau penyalahan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian BUMKam dan diputuskan dengan keputusan kepala kampung.

### Wewenang komisaris

- a. Melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pelaksanaan operasional.
- b. Meminta penjelasan dari pengurus dari segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMKam.
- c. Melindungi BUMKam terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMKam.
- d. Mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk membahas segala hal yang terkait dengan kinerja BUMKam.
- e. Rapat umum untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus dalam melakukan pengawasan, penetapan, dan kebijakan dalam pengembangan usaha dalam melaksanakan pemeriksaan.

Pelaksana Operasional yang terdiri dari direktur dan kepala unit usaha.

#### 1. Direktur BUMKam

Direktur bertanggung jawab kepada Pemerintah Kampung atas pengelolaan BUMKam dan mewakili BUMKam di dalam dan diluar pengadilan. Dalam membantu pelaksanaan tugas Direktur dan Kepala Unit Usaha maka Direktur dapat mengangkat Asisten dan staf sesuai kebutuhan dan keadaan keuangan.

#### Tugas

- a. Sebagai pimpinan organisasi pelaksana operasional secara Kelembagaan dan Administrasi.
- b. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga Kampung.
- c. Mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi kampung yang adil dan merata.
- d. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di dalam dan luar kampung
- e. Menggali dan mengembangkan memanfaatkan potensi ekonomi kampung
- f. Membina dan mengevaluasi kinerja kepala unit, Asisten dan staf pelaksana operasional.

#### Kewajiban

- a. Membuat laporan keuangan sesuai dengan rekapan laporan keuangan unit usaha.
- b. Membuat dan menyampaikan proses kegiatan dalam bulan berjalan
- c. Menyampaikan laporan dari seluruh usaha tiap bulan dengan tembusannya kepada Dewan Pembina.
- d. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa minimal satu (1) kali dalam setahun bagi BUMKam.

## 2. Kepala Unit Usaha Tugas dan kewajiban Kepala Unit Usaha:

### Tugas :

- a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada direktur
- b. Mengembangkan unit usaha agar berkembang dan mencari solusi agar unit usahanya tidak merugi atau pelit.
- c. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata
- d. Melakukan kas opname harian pada posisi kas harian terhadap staf keuangan

### Kewajiban

- a. Membuat laporan keuangan unit usaha dan disampaikan kepada direktur
- b. Membuat dan menyampaikan proses kegiatan dalam bulan berjalan kepada Direktur.
- c. Membuat laporan lisan maupun tulisan kepada Direktur tentang rencana kebijakan terhadap unit usaha
- d. Bersama dengan Direktur sebagai specimen tanda tangan pada Bank yang disepakati, untuk rekening unit usaha.

Badan Usaha milik Kampung ini berdiri dikarenakan pemerintah kampung ingin membentuk sebuah lembaga perekonomian yang dapat mengelola potensi yang dimiliki di kampung Sangga Buana. Selain untuk mengelola potensi kampung yang dimiliki juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Banyak potensi kampung yang dapat dikelola dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat oleh karena itu pemerintah kampung mendirikan BUMKam Buana Jaya ini untuk membantu masyarakat dalam mengelola potensi-potensi tersebut. Potensi yang dimiliki Kampung Sangga Buana menurut Kepala Kampung yaitu Sarjono menyatakan bahwa :

1. Bidang Simpan Pinjam yang terletak di dusun VI Kampung Sangga Buana secara langsung mengelola keuangan yang bertujuan untuk menyediakan penyertaan modal untuk masyarakat Kampung Sangga Buana.

2. Bidang yang bergerak di perdagangan yang terdapat di Dusun VI Kampung Sangga Buana mengelola ATK, Fhotocopy dll.
3. Bidang Peternakan yang terdapat di Dusun I Kampung Sangga Buana mengelola kegiatan usaha dibidang Peternakan, namun sampai saat ini haya ada satu usaha yang sedang dikembangkan yaitu penggemukan sapi.

Adapun tujuan dari didirikannya BUMKam Buana Jaya sesuai dengan Permendes No 4 Tahun 2015 yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan PAD
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa dengan kebutuhan masyarakat
4. Membantu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dihubungkan dengan analisis pembahasan yang bersumber dari hasil wawancara dengan 12 informan, maka dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan BUMKam Buana Jaya sudah berjalan yaitu di Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Efektivitas pengawasan BPK yang diuraikan berdasarkan indikator pengawasan yaitu Penetapan Standar, Penetapan Pengukuran Standar, Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan dan Pengambilan Tindakan Koreksi dalam pengelolaan BUMKam Buana Jaya dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan BPK terhadap pengelolaan BUMKamnya efektif, yaitu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengelolaan BUMKam Buana Jaya dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut:
  - a. Perencanaan sudah dilakukan dengan baik karena dalam perencanaan sudah melibatkan masyarakat dalam musyawarah baik dari tingkat musyawarah dusun sampai musyawarah kampung yang bertujuan untuk mengetahui potensi desa yang cocok untuk dijadikan unit usaha BUMKam.
  - b. Pelaksanaan dalam pengelolaan BUMKam sudah menjalankan tetapi ada hambatan yaitu dalam pengelolaan unit usaha penggemukan sapi tidak berjalan dengan baik.

- c. pertanggungjawabannya dalam pengelolaan BUMKam Buana Jaya sudah berjalan baik karena pengelola sudah menyelesaikan dan mengetahui hasil pekerjaannya sudah sesuai dengan planing, pertanggungjawaban administratif sudah dilakukan dengan efektif melalui Laporan Pertanggungjawaban berupa LPJ sudah berjalan . tapi ada kelemahan dalam pengelolaan BUMKam tidak berjalan yang dibuktikan dengan tidak ada perkembangan untuk jangka panjang.
2. Efektivitas pengawasan BPK terhadap Pengelolaan BUMKam efektif yaitu sebagai berikut:
    - a. Penetapan Standar sudah sesuai dengan tujuan pengawasan yaitu mengetahui jalannya perencanaan setiap unit usaha BUMKam, mengetahui budget yang digunakan sudah sesuai dengan SOP, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan planing yang telah ditentukan.
    - b. Penetapan pengukuran standar yang dilakukan oleh pengawas melalui standar waktu yaitu Badan Permusyawaratan Kampung melakukan pengawasan setiap bulan atau sesuai dengan kebutuhan sudah sesuai dengan tujuan menetahui jalannya pekerjaan dan mengetahui pelaksanaan kerjanya sesuai dengan pelaksanaannya.
    - c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPK yaitu memberikan saran untuk mengalih fungsikan anggaran unit usaha penggemukan sapi ke unit usaha simpan pinjam dan sudah sesuai dengan tujuan pengawasan yaitu memperbaiki kesalahan yang ada dan melakukan pencegahan agar tidak terulang kembali.
    - d. Tindakan koreksi tidak ada penyimpangan yang terjadi sehingga sesuai dengan tujuan pengawasan yaitu jalannya perencanaan sesuai dengan SOP.

Pengelolaan BUMKam yang dilakukan dengan baik dan Efektivitas Pengawasan BPK terhadap BUMKam yang sudah efektif tidak mencerminkan bahwa pengawasan BPK terhadap BUMKam dapat meningkatkan pekeconomian kampung, meningkatkan PADes karena pengawasan BPK terhadap BUMKam kampung sangga buana sudah efektif. Tetapi pengelolaan untuk meningkatkan perekonomian kampung dan meningkatkan PADes untuk kampung sangga buana tidak efektif dilihat dari tidak adanya pengelolaan jangka panjang.

## **B. Saran**

Mengacu pada penjelasan diatas, maka penulis memberikan saran terkait dengan efektivitas pengawasan BPK terhadap Pengelolaan BUMKam Buana Jaya di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam pengawasan, agar ditambahkan anggota BPK sesuai dengan regulasi yang sudah diatur mengenai anggota BPK ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan kampung agar lebih efektif
2. Untuk tahun selanjutnya untuk BPK sebagai pengawas terhadap pengelolaan BUMKam Buana Jaya harus melibatkan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan BUMKam dengan menggunakan sistem akuntansi sehingga data yang ada tidak tercecer dan tersimpan rapi. Meningkatkan dan memperkuat pola komunikasi antara lembaga kampung dan pertemuan rutin bulanan atau tri wulan untuk membahas perkembangan BUMKam sehingga perkembangan BUMKam dapat diketahui oleh segala pihak yang ada di Kampung Sangga Buana, agar lebih meningkatkan unit kegiatan usaha sehingga meningkatkan pendapatan BUMKam dan dapat disalurkan ke kas Kampung Sangga Buana sehingga peran BUMKam lebih maju.

3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan tidak berfokus pada sekedar pada pengawasan BPK terhadap BUMKam namun bisa menciptakan hal-hal maupun temuan yang baru untuk meningkatkan BUMKam. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini menjadi bahan cambukan ataupun masukan kepada pemerintah Kampung, pengurus operasional BUMKam dan Masyarakat agar menjalankan dan memanfaatkan dengan baik BUMKam guna terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan desa.
4. Untuk pelaksana operasional BUMKam agar lebih mengenal teknologi dengan lebih baik lagi dan tentu ini akan sangat membantu pengelolaan BUMKam dan perangkat pemerintah kampung sehingga buana harus memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pembentukan dan pelaksanaan BUMKam untuk mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di kampung untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Penerbit Aswaja Pressindo. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bungin, B. (2015). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- David Wijaya (2018). *BUMDesa Badan Usaha Milik Desa*. Gava Media. Yogyakarta.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. PT Semesta Rakyat Merdeka. Jakarta.
- Erni, Daly. 2008. *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan*. Kencana. Jakarta.
- Hari Sabarno. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2002. *Manajemen Sumber daya manusia*. PT Bumi perkasa. Jakarta.
- Huda Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*.: FH UII PRESS. Yogyakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu – Ilmu Sosial*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa pada masa transisi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Maryunani. 2008. *Pembangunan BUMK dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. CV. Pustaka Setia. Bandung.

- Moleong, Lexy. 2011. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Moleong, & Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sisdiwiyanto. 2014. Efektifitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah . Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Pandoyo, Hendraman Ranu ( 2007). *Prinsip Pendisiplinan*. FE UGM. Yogyakarta.
- PKDSP. 2007. *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMK)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.
- Sisdiwiyanto. 2014. Efektifitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah . Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sutarno, NS (2004). *Manajemen Perpustakaan: suatu pendekatan praktik..* Sagung Seto. Jakarta.
- Tamara Bryant. Pam Schiller. (2002). *6 Modal Dasar Bagi Anak*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.